

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan wilayah adalah perencanaan penggunaan ruang wilayah (termasuk perencanaan pergerakan didalam ruang wilayah) dan perencanaan kegiatan pada ruang wilayah tersebut. Perencanaan penggunaan ruang wilayah diatur dalam bentuk perencanaan tata ruang wilayah, sedangkan perencanaan kegiatan dalam wilayah diatur dalam perencanaan pembangunan wilayah (Robinson Tarigan, 2005). Perencanaan pembangunan wilayah sebaiknya menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral biasanya *less-spatial* (kurang memperhatikan aspek ruang secara keseluruhan), sedangkan pendekatan regional lebih bersifat *spatial* dan merupakan jembatan untuk mengaitkan perencanaan pembangunan dengan rancana tata ruang.

Pendekatan sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor. Selanjutnya setiap sektor dianalisis satu per satu. Setiap sektor dilihat potensi dan peluangnya, menetapkan apa yang dapat ditingkatkan dan dimana lokasi dari kegiatan peningkatan tersebut. Sedangkan pendekatan regional dalam pengertian sempit adalah memperhatikan ruang dengan segala kondisinya. Dan secara luas bisa diartikan memperhatikan penggunaan ruang untuk kegiatan produksi/jasa juga memprediksi arah konsentrasi kegiatan dan memperkirakan kebutuhan fasilitas untuk masing-masing konsentrasi serta merencanakan jaringan-jaringan perhubungan sehingga berbagai konsentrasi kegiatan dapat dihubungkan secara efisien.

Pembangunan ekonomi merupakan serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dalam kerangka perekonomian daerah, Arsyad (1999) menyatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah adalah proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi daerah. Dalam kerangka pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah tersebut

dibutuhkan kebijakan pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah, dengan menggunakan potensi sumberdaya lokal.

Dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan daerah maka pemerintah mengeluarkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Otonomi daerah memiliki pengertian hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula dalam kebijakan pembangunan ekonomi. Masing-masing daerah sudah lebih bebas dalam menetapkan sektor/komoditi yang diprioritaskan pengembangannya. Kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan diwilayahnya menjadi semakin penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Oleh karena itu, diperlukannya identifikasi terhadap sektor-sektor yang memiliki keunggulan tersebut. Hal ini menjadi penting dikarenakan sektor-sektor yang belum diketahui keunggulannya sulit untuk dikembangkan.

Propinsi Sumatera Barat merupakan salah satu propinsi yang terdapat dipulau sumatera. Luas Propinsi Sumatera Barat yaitu 42.297 Km² merupakan propinsi terbesar keenam dipulau sumatera. Propinsi Sumatera Barat memiliki 12 Kabupaten dan 7 Kota. Dengan jumlah penduduk sebanyak 5,13 juta jiwa yang terdiri dari 2,55 juta laki-laki dan 2,58 juta perempuan pada tahun 2014 yang tersebar pada 19 kabupaten dan kota tersebut.

Adanya perbedaan kegiatan ekonomi disetiap wilayah kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat mempengaruhi kondisi perekonomian masing-masing kabupaten dan kota, terutama sektor unggulan yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten dan kota. Sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada wilayah tersebut. Dimana kebijakan pembangunan pada saat ini lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi.

Dalam penyusunan rencana sektoral atau sektor perekonomian pada masa yang akan datang perlu diketahui tipologi kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan faktor ekonomi. Hal ini bertujuan agar melihat daerah mana yang menjadi prioritas pengembangan dan apa yang akan dikembangkan. Disisi lain juga melihat sarana dan prasara

pendukung perekonomian. Hal tersebut jelas berpengaruh terhadap perekonomian suatu wilayah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan perekonomian kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat?
2. Apa saja sektor unggulan masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimana hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimana hubungan sarana dan prasarana perekonomian terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat?

Dari uraian diatas, maka diperlukan suatu kajian mengenai “*Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat*”. Sehingga dari kajian ini diharapkan bisa menjadi acuan atau bahan referensi bagi perencanaan kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat pada masa yang akan datang.

1.3 Tujuan dan Sasaran Studi

1.3.1 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten dan kota
2. Untuk mengetahui sektor-sektor unggulan masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan
4. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

1.3.2 Sasaran

Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan diatas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dilakukan didalam studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi pola dan struktur pertumbuhan perekonomian masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat
2. Mengidentifikasi kondisi sektor-sektor unggulan masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat
3. Mengidentifikasi kondisi kependudukan masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat
4. Mengidentifikasi kondisi sarana dan prasarana masing-masing kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat

1.4 Manfaat Studi

Adapun manfaat dari studi ini adalah tersusunnya suatu informasi mengenai pola dan struktur perekonomian masing-masing kabupaten dan kota dan sektor-sektor unggulan masing-masing kabupaten dan kota. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan dan referensi bagi perencanaan dan pengembangan sektor perekonomian masing-masing kabupaten dan kota pada masa yang akan datang.

1.5 Ruang Lingkup Studi

Ruang lingkup studi pada studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Ruang lingkup wilayah adalah batasan-batasan kawasan studi sedangkan ruang lingkup materi adalah batasan-batasan variabel dan indikator yang digunakan dalam studi ini.

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah

Kabupaten adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia setelah propinsi, yang dipimpin oleh seorang bupati. Selain kabupaten, pembagian wilayah administratif setelah propinsi adalah kota. Secara umum, baik kabupaten dan kota memiliki wewenang yang sama. Kabupaten bukanlah bawahan dari propinsi, karena itu bupati atau wali kota tidak

bertanggung jawab kepada gubernur. Kabupaten maupun kota merupakan daerah otonom yang diberi wewenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri.

Akan tetapi ditinjau dari faktor fisik, kependudukan, ekonomi, wilayah dan sarana dan prasarana kabupaten dan kota sangatlah berbeda. Untuk itu, dalam studi kajian tipologi kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat ini, kabupaten dan kota dipisah. Sehingga hasil dari studi ini didapat tipologi untuk kabupaten-kabupaten dan tipologi untuk kota-kota.

Secara geografis Propinsi Sumatera Barat terletak antara 0°54' LU - 3°30' LS serta 98°36' BT - 101°53' BT dan dilalui garis katulistiwa (garis lintang nol derajat/garis equator). Wilayah ini mempunyai batas-batas sebagai berikut :

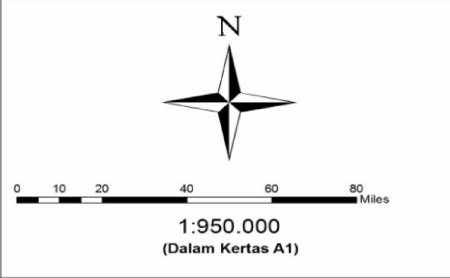
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Bengkulu
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Riau dan Jambi dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut ini:



**KAJIAN TIPOLOGI
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**Gambar 1.1
PETA ADMINISTRASI
PROPINSI SUMATERA BARAT**



Legenda

■ IBUKOTA PROPINSI	■ Kab. Pasaman
● IBUKOTA KABUPATEN/KOTA	■ Kab. Pasaman Barat
▲ GUNUNG	■ Kab. Pesisir Selatan
— JALAN NASIONAL	■ Kab. Sijunjung
- - - BATAS PROPINSI	■ Kab. Solok
- - - - BATAS KABUPATEN/KOTA	■ Kab. Solok Selatan
■ DANAU	■ Kab. Tanah Datar
■ SAMUDERA HINDIA	■ Kota Bukittinggi
KABUPATEN/KOTA	■ Kota Padang
■ Kab. 50 Kota	■ Kota Padang Panjang
■ Kab. Agam	■ Kota Pariaman
■ Kab. Dharmasraya	■ Kota Payakumbuh
■ Kab. Kep. Mentawai	■ Kota Sawah Lunto
■ Kab. Padang Pariaman	■ Kota Solok

**Muhammad Chandra Agusti
1010015311008**

Dosen Pembimbing:
Pembimbing I : Harne Julianti Tou ST, MT
Pembimbing II : Ir. Hamdi Nur, MTP

Sumber Peta :
- BAPPEDA Propinsi Sumatera Barat

**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN PERENCANAAN
UNIVERSITAS BUNG HATTA
2016**

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi pada studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini dibatasi hanya membahas tipologi secara wilayah. Yaitu perbandingan antara rata-rata laju pertumbuhan kabupaten dan kota dengan laju pertumbuhan propinsi dan juga perbandingan PDRB Perkapita kabupaten dan kota dengan PDRB Perkapita propinsi. Selain itu juga dikaji mengenai kondisi kependudukan dan sarana prasarana perekonomian masing-masing kabupaten dan kota

1.6 Metodologi Studi

Dalam studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini terdapat dua metodologi studi, yaitu metode pengumpulan data dan metode analisis. Metode pengumpulan data berisikan bagaimana cara penulis memperoleh data. Sedangkan metode analisis berisikan analisis yang akan digunakan dalam studi.

1.6.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data sangat penting untuk mempertanggung jawabkan kebenaran ilmiah suatu studi, selain itu metode studi juga diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan studi yang ingin dicapai. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada studi ini adalah:

1. Field Research

Penulis melakukan survey ke instansi yang menyediakan data sekunder yang diperlukan dalam memperoleh tujuan studi, Instansi yang dimaksud seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Propinsi Sumatera Barat dan Bappeda Propinsi Sumatera Barat.

2. Library Research

Landasan dan teori yang kuat dibutuhkan dalam pemecahan masalah, sehingga penulis melakukan pengumpulan teori-teori dengan cara mengumpulkan buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel ilmiah, data-data dari internet, dan lainnya yang berhubungan dengan studi.

1.6.2 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini adalah deskriptif kualitatif. Analisis-analisis yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Analisis Tipologi Klassen

Penggunaan analisis tipologi klassen pada studi ini dilatar belakangi oleh penggunaan variabel yang digunakan pada analisis ini. Variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita. Kedua variable tersebut menggambarkan perkembangan dan pertumbuhan kabupaten dan kota di Propinsi Sumatera Barat berdasarkan faktor ekonomi.

2. Analisis Rasio atau Perbandingan

Analisis ini digunakan untuk melihat perbandingan antara kondisi eksisting dengan standar yang telah dikeluarkan pemerintah. Dalam hal ini akan dipakai pada faktor sarana dan prasarana.

3. Analisis Interval Sederhana

Analisis ini digunakan untuk membagi data, atau nilai yang didapatkan dengan cara:

$$Interval = \frac{Nilai\ Tertinggi - Nilai\ Terendah}{Jumlah\ Interval\ yang\ akan\ dibuat}$$

Tabel 1.1
Penilaian Variabel dalam Studi

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Variabel	Analisis	Keluaran
1	Faktor Ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• PDRB atas dasar harga berlaku kabupaten dan kota• PDRB atas dasar harga konstan 2010 kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none">• Analisis laju pertumbuhan ekonomi• Analisis PDRB Perkapita• Analisis LQ• Analisis Tipologi Klassen	<ul style="list-style-type: none">• Tipologi klassen kabupaten dan kota• Sektor unggulan atau potensial kabupaten dan kota
2	Kepemududukan	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah penduduk miskin kabupaten dan kota• Jumlah penduduk usia produktif kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none">• Analisis interval sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Tingkatan penduduk miskin kabupaten dan kota• Tingkatan penduduk usia produktif kabupaten dan kota
3	Sarana dan prasara ekonomi	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah pasar kabupaten dan kota• Kondisi jalan kabupaten dan kota	<ul style="list-style-type: none">• Rasio atau perbandingan• Interval sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Tingkatan kabupaten dan kota berdasarkan sarana dan prasarana

No	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Variabel	Analisis	Keluaran
		<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi jaringan listrik kabupaten dan kota • Kondisi air bersih kabupaten dan kota 		

Sumber: Hasil Analisis 2016

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup yang meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II STUDI LITERATUR

Bab ini berisikan mengenai pengertian-pengertian yang terkait dengan studi, teori-teori dan analisis yang akan digunakan dalam menyelesaikan studi Kajian Tipologi Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat

BAB III GAMBARAN UMUM

Bagian ini berisikan gambaran atau data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu berisikan gambaran umum wilayah kabupaten dan kota, gambaran tentang kependudukan, perekonomian dan sarana prasarana perekonomian kabupaten dan kota

BAB IV ANALISIS TIPOLOGI KABUPATEN DAN KOTA DI PROPINSI SUMATERA BARAT

Berisikan analisis berdasarkan tujuan dan sasaran dari studi. Analisis yang digunakan yaitu analisis laju pertumbuhan ekonomi, analisis PDRB Perkapita, analisis LQ, dan analisis tipologi klassen. Selain itu juga dianalisis kependudukan miskin dan sarana prasarana perekonomian kabupaten dan kota.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan rekomendasi hasil studi dengan memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini.

1.8 Kerangka Pemikiran

Gambar 1.2
Kerangka Pemikiran

